

## **BAB 4**

### **ANALISIS**

#### **4.1 Analisis Pusat Pelayanan**

Pusat pelayanan merupakan wilayah yang berkembang sebagai titik pertumbuhan akibat adanya dorongan aktivitas pembangunan. Dorongan tersebut dapat mendorong munculnya berbagai kegiatan lain di sekitarnya, sehingga aktivitas-aktivitas tersebut cenderung terkonsentrasi pada lokasi tertentu dan membentuk suatu kawasan dengan fungsi pelayanan tertentu. Kawasan inilah yang kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan atau pusat pelayanan (Nugraha dkk., 2024). Pusat pelayanan dianalisis menggunakan metode skalogram dan indeks sentralitas *Marshall*. Metode skalogram digunakan untuk menganalisis kelengkapan serta variasi fasilitas yang tersedia pada suatu wilayah, sedangkan indeks sentralitas *Marshall* digunakan untuk mengukur tingkat kepusatan wilayah berdasarkan jumlah dan bobot fasilitas yang dimiliki. Kedua metode tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan hierarki pusat pelayanan pada masing-masing wilayah.

##### **4.1.1 Skalogram**

Metode skalogram merupakan salah satu teknik analisis wilayah yang digunakan untuk mengidentifikasi hierarki daerah berdasarkan ketersediaan, keragaman, dan jumlah fasilitas pelayanan yang dimiliki. Semakin lengkap fasilitas yang tersedia, semakin tinggi pula posisi suatu wilayah dalam hierarki pelayanan. Pada penelitian ini, penerapan analisis skalogram didasarkan pada enam kategori fasilitas yang tersebar di setiap kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 14. Menurut Sutaryo & Abidin, (2015) ketersediaan fasilitas di kabupaten/kota akan diberi kode angka "1", sementara apabila tidak tersedia ditandai dengan kode angka "0". Langkah pertama untuk menentukan pusat pertumbuhan adalah menghitung jumlah kelas. Menurut Tuar, (2019) pengelompokan wilayah ke dalam beberapa orde pusat pelayanan dilakukan menggunakan pendekatan Sturges. Metode ini berfungsi untuk menentukan jumlah kelas yang akan digunakan dalam proses klasifikasi kabupaten berdasarkan karakteristik pelayanan wilayahnya. Perhitungan jumlah kelas dilakukan dengan menggunakan rumus berikut.

$$K = 1 + 3,3 \log (n)$$

$$K = 1 + 3,3 \log (4)$$

$$K = 1 + 1.98$$

$$K = 2.98 \approx 3$$

n = jumlah wilayah

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah kelas sebesar 2.98 yang akan dibulatkan menjadi 3 kelas, sehingga penentuan pusat pertumbuhan di Provinsi DIY didasarkan pada tiga kelas atau tiga hierarki. Langkah selanjutnya yaitu menentukan jarak atau interval kelas menggunakan rumus (Tuar, 2019) :

$$Interval = \frac{A - B}{k}$$

$$Interval = \frac{24 - 22}{k}$$

$$Interval = \frac{24 - 22}{3}$$

$$Interval = 0,6$$

A = Total fasilitas tertinggi

B = Total fasilitas terendah

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, rentang antar kelas atau interval sebesar 0,6, sehingga didapatkan susunan hierarki wilayah sebagai berikut :

**Tabel 3. Hasil Kelas Skalogram**

Interval	Tingkatan	Keterangan
23,2 - 24	Hierarki I	Pusat Pertumbuhan Wilayah
22,6 - 23,2	Hierarki II	<i>Hinterland</i> (Wilayah Pendukung)
22 - 22,6	Hierarki III	

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Tahap terakhir hierarki nilai COR (*Coefficient of Reproductibility*) menjadi salah satu ketentuan tingkat kelayakan pada metode skalogram dengan nilai ideal antara 0,9-1. Koefisien yang memiliki nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa instrumen atau skala yang digunakan memiliki tingkat konsistensi dan validitas yang tinggi. Nilai koefisien di atas 0,9 dijadikan sebagai batas kelayakan, sehingga skala tersebut dapat dianggap representatif untuk digunakan pada tahapan analisis berikutnya. Berikut merupakan rumus COR menurut (Taufiqurrachman, 2024). *Error* dapat dilihat pada perhitungan di lampiran 14.

$$COR = 1 - \frac{\Sigma e}{N \times K}$$

$$COR = 1 - \frac{6}{100}$$

$$COR = 1 - \frac{6}{4 \times 25}$$

$$COR = 1 - 0,06$$

$$COR = 0,94$$

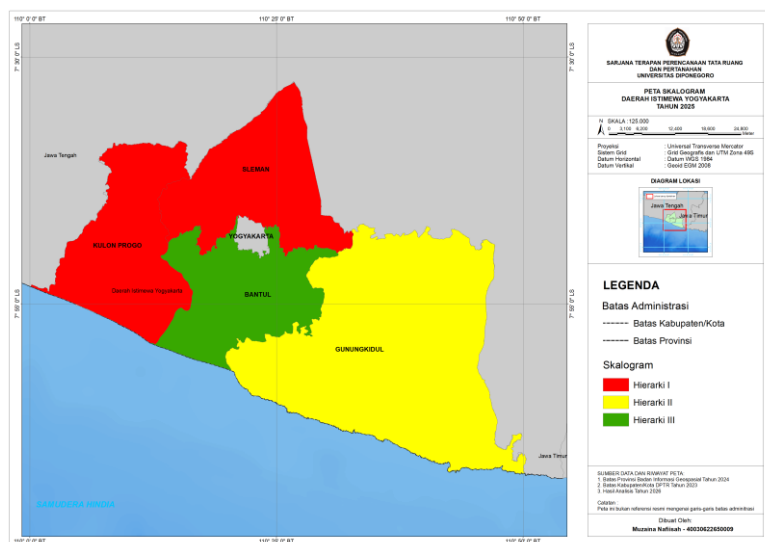
Berdasarkan hasil perhitungan COR dengan hasil 0,94 Nilai ini berada pada interval 0,9 – 1, sehingga metode skalogram dinilai sudah layak untuk fasilitas di Provinsi DIY pada tahun 2025. Berikut merupakan hasil akhir dari metode skalogram.

**Tabel 4. Skalogram**

No	Kabupaten	Total Jenis Fasilitas	Hierarki Wilayah	Keterangan
1.	Sleman	24	Hierarki I	Pusat Pertumbuhan
2.	Kulon Progo	24		
3.	Gunungkidul	23	Hierarki II	<i>Hinterland</i> (Wilayah Pendukung)
4.	Bantul	22	Hierarki III	

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan hasil metode skalogram, perbedaan hierarki antarwilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya ketimpangan tingkat kelengkapan fasilitas pelayanan. Perbedaan tersebut tidak hanya menggambarkan banyak atau sedikitnya jumlah fasilitas, tetapi juga menunjukkan perbedaan kemampuan wilayah dalam menjalankan fungsi pelayanan, menarik aktivitas penduduk, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Tingkat kelengkapan fasilitas menjadi salah satu indikator kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Wilayah yang memiliki jenis fasilitas yang lebih beragam umumnya mempunyai daya layan yang lebih tinggi, tidak hanya untuk penduduknya sendiri tetapi juga bagi wilayah di sekitarnya. Berikut merupakan peta skalogram DIY.



Sumber : Hasil Analisis, 2026

**Gambar 17 Peta Skalogram DIY**

Wilayah yang masuk ke dalam hierarki I, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo, dapat dimaknai sebagai wilayah dengan tingkat kelengkapan fasilitas paling

tinggi. Artinya, kedua wilayah tersebut memiliki fungsi pelayanan yang lebih kuat dibandingkan wilayah lainnya. Klasifikasi Hierarki I mencerminkan peran strategis suatu wilayah dalam struktur pelayanan regional. Pada tingkatan ini, wilayah tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan permukiman, tetapi juga menjadi pusat penyelenggaraan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik yang melayani masyarakat secara lebih luas. Kondisi ini menyebabkan wilayah hierarki I memiliki daya tarik yang lebih besar terhadap penduduk, investasi, dan pergerakan barang maupun jasa.

Kabupaten Sleman dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan karena memiliki konsentrasi fasilitas yang menunjang dan didukung oleh kedekatannya dengan kawasan perkotaan Yogyakarta. Kelengkapan fasilitas tersebut mendorong terjadinya pemusatan aktivitas ekonomi dan sosial. Ketika fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan transportasi terkonsentrasi pada suatu wilayah, maka wilayah tersebut akan menjadi tujuan masyarakat dari wilayah lain untuk bekerja, belajar, berobat, berdagang, maupun mengakses layanan tertentu. Akibatnya, terjadi peningkatan mobilitas penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi, serta perkembangan kawasan terbangun. Inilah yang menjadikan wilayah hierarki I berpotensi sebagai pusat pertumbuhan, karena pertumbuhan tidak hanya terjadi di dalam wilayah tersebut, tetapi juga dapat memengaruhi wilayah di sekitarnya.

Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo juga termasuk dalam hierarki I karena memiliki kelengkapan fasilitas yang tinggi, terutama apabila fasilitas transportasi strategis menjadi salah satu komponen penilaian skalogram. Keberadaan fasilitas transportasi berskala besar dapat meningkatkan posisi suatu wilayah dalam sistem pelayanan karena transportasi berperan sebagai penghubung arus manusia, barang, dan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, Kulon Progo tidak hanya berfungsi sebagai wilayah pinggiran, tetapi mulai menunjukkan peran sebagai sub-pusat pertumbuhan baru. Dampaknya, wilayah ini berpotensi mengalami peningkatan investasi, perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan kawasan perdagangan dan jasa, serta peningkatan interaksi dengan wilayah lain.

Wilayah yang berada pada hierarki II, yaitu Kabupaten Gunungkidul, memiliki tingkat kelengkapan fasilitas sedang. Maknanya, wilayah ini telah memiliki sejumlah fasilitas penting, tetapi belum memiliki kelengkapan dan keberagaman fasilitas sekuat wilayah hierarki I. Kabupaten Gunungkidul dapat berperan sebagai pusat pelayanan tingkat menengah atau pusat pelayanan sekunder. Artinya, wilayah ini mampu melayani sebagian besar kebutuhan dasar masyarakatnya, tetapi untuk fasilitas tertentu yang lebih spesifik atau

berskala tinggi, masyarakat masih cenderung bergantung pada wilayah hierarki I. Dampak dari posisi hierarki II adalah Gunungkidul memiliki peran sebagai wilayah *hinterland*/pendukung sekaligus wilayah yang masih membutuhkan penguatan fasilitas. Jika fasilitas pelayanan di wilayah ini ditingkatkan, maka ketergantungan terhadap pusat pertumbuhan utama dapat dikurangi. Namun, apabila pengembangan fasilitas berjalan lambat, maka arus pergerakan penduduk menuju wilayah hierarki I akan tetap tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan pusat pertumbuhan semakin terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara wilayah hierarki II hanya menjadi daerah pendukung atau daerah asal pergerakan penduduk.

Adapun wilayah yang masuk ke dalam hierarki III, yaitu Kabupaten Bantul, menunjukkan tingkat kelengkapan fasilitas yang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya dalam hasil skalogram. Hierarki III dapat dimaknai sebagai wilayah dengan fungsi pelayanan yang lebih terbatas. Wilayah pada hierarki ini belum mampu menyediakan seluruh jenis fasilitas secara lengkap, terutama fasilitas yang bersifat strategis atau memiliki jangkauan pelayanan luas. Oleh karena itu, wilayah hierarki III cenderung bergantung pada wilayah dengan hierarki yang lebih tinggi.

Kabupaten Bantul dalam konteks ini dapat dipahami sebagai wilayah *hinterland*/penyangga atau wilayah belakang dari pusat pertumbuhan. Disebut sebagai *hinterland* karena wilayah ini memiliki hubungan ketergantungan dengan pusat pelayanan yang lebih tinggi, baik dalam hal akses terhadap fasilitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun transportasi. Masyarakat dari wilayah *hinterland* umumnya melakukan pergerakan menuju pusat pertumbuhan untuk memperoleh pelayanan yang tidak tersedia atau belum memadai di wilayahnya sendiri. Hubungan ini menunjukkan adanya pola interaksi pusat–pinggiran, di mana pusat pertumbuhan menyediakan fasilitas dan peluang ekonomi, sedangkan wilayah *hinterland* menjadi daerah pendukung, penyedia tenaga kerja, permukiman, serta pasar bagi aktivitas pusat.

Kelengkapan fasilitas yang tinggi menyebabkan suatu wilayah memiliki daya tarik dan daya pelayanan yang besar. Daya tarik tersebut mendorong masuknya penduduk, modal, kegiatan perdagangan, dan jasa. Akibatnya, wilayah tersebut berkembang lebih cepat dan membentuk pusat pertumbuhan. Sebaliknya, wilayah dengan fasilitas yang terbatas akan memiliki daya pelayanan yang lebih rendah. Keterbatasan tersebut menyebabkan masyarakat harus mengakses fasilitas ke wilayah lain, sehingga muncul ketergantungan

terhadap pusat pertumbuhan, dalam jangka panjang, apabila tidak diimbangi dengan pemerataan fasilitas, kondisi ini dapat memperkuat ketimpangan antarwilayah. Dengan demikian, hasil skalogram tidak hanya menunjukkan urutan wilayah berdasarkan jumlah fasilitas, tetapi juga menggambarkan struktur pelayanan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo berperan sebagai wilayah dengan fungsi pelayanan utama dan berpotensi sebagai pusat pertumbuhan. Kabupaten Gunungkidul berada pada posisi menengah sebagai wilayah penyangga/*hinterland* yang masih perlu diperkuat peran pelayanannya. Sementara itu, Kabupaten Bantul berperan sebagai wilayah *hinterland* yang masih memiliki ketergantungan terhadap wilayah dengan hierarki lebih tinggi. Oleh karena itu, arahan pengembangan wilayah sebaiknya tidak hanya berfokus pada pusat pertumbuhan yang sudah kuat, tetapi juga pada peningkatan fasilitas di wilayah hierarki II dan III agar pertumbuhan wilayah menjadi lebih merata.

#### 4.1.2 Indeks Sentralitas *Marshall*

Indeks sentralitas *Marshall* merupakan metode analisis yang digunakan sebagai pelengkap dalam metode skalogram. Berbeda dengan skalogram yang hanya melihat keberadaan fasilitas, metode ini memberikan bobot pada setiap jenis fasilitas yang diamati. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh dari indeks sentralitas *Marshall* dapat berbeda dengan hasil metode skalogram. Menentukan indeks sentralitas *Marshall* diperlukan beberapa perhitungan. Menurut Tuar dkk., (2019) langkah pertama melakukan perhitungan bobot fasilitas. Kemudian menghitung indeks sentralitas *Marshall* setiap unit fasilitas. Lampiran 16 merupakan hasil perhitungan indeks sentralitas *Marshall*. Setelah melakukan perhitungan tersebut selanjutnya pengelompokan data, banyaknya kelas dan rentang setiap kelas ditentukan melalui perhitungan dengan rumus sebagai berikut.

$$K = 1 + 3,3 \log (n)$$

$$K = 1 + 3,3 \log (4)$$

$$K = 1 + 1,98$$

$$K = 2,98 \approx 3$$

n = jumlah wilayah

K = Kelas interval

Hasil penerapan rumus menunjukkan bahwa banyaknya kelas yang terbentuk adalah sebesar 2,98. Sesuai kaidah pembulatan, nilai tersebut kemudian disesuaikan menjadi tiga kelas untuk keperluan pengelompokan dan interpretasi data, sehingga penentuan pusat

pertumbuhan di Provinsi DIY didasarkan pada tiga kelas atau tiga hierarki. Langkah selanjutnya yaitu menentukan jarak atau interval kelas menggunakan rumus (Tuar, 2019) :

$$Interval = \frac{A - B}{k}$$

$$Interval = \frac{806,17 - 522,57}{k}$$

$$Interval = \frac{806,17 - 522,57}{3}$$

$$Interval = 95$$

A = Total fasilitas tertinggi

B = Total fasilitas terendah

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, rentang antar kelas atau interval sebesar 136,16, sehingga didapatkan susunan hierarki wilayah sebagai berikut :

**Tabel 5. Kelas Indeks Sentralitas Marshall**

Interval	Wilayah	Tingkatan	Keterangan
712,57 – 807,57	Sleman	Hierarki I	Pusat Pertumbuhan Wilayah
617,57 – 712,57	-	Hierarki II	<i>Hinterland</i> (Wilayah Pendukung)
522,57 – 617,57	Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul	Hierarki III	<i>Hinterland</i> (Wilayah Pendukung)

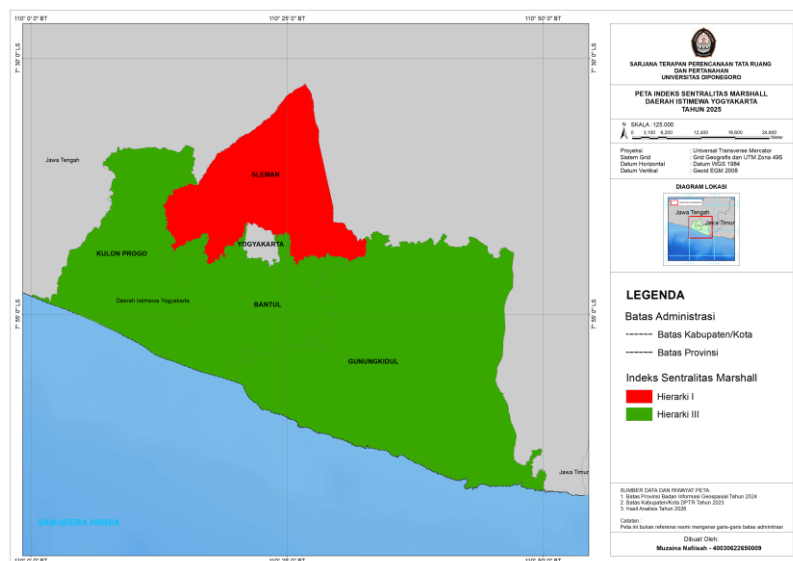
Sumber : Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan hasil metode Indeks Sentralitas *Marshall* pada lampiran 16, struktur pusat pelayanan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya pemusatan fungsi pelayanan yang kuat pada Kabupaten Sleman. Hal ini terlihat dari nilai indeks Kabupaten Sleman yang berada pada interval 712,57–807,57 dan termasuk dalam Hierarki I. Sementara itu, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul berada pada Hierarki III dengan interval nilai 522,57–617,57. Perbedaan hierarki ini menunjukkan bahwa kemampuan setiap wilayah dalam menyediakan dan menyebarkan pelayanan tidak sama.

Berdasarkan gambar 18 wilayah yang masuk dalam Hierarki I memiliki makna sebagai wilayah dengan tingkat sentralitas tertinggi. Artinya, wilayah tersebut tidak hanya memiliki jumlah fasilitas yang banyak, tetapi juga memiliki fasilitas dengan bobot pelayanan yang tinggi. Indeks sentralitas *Marshall*, fasilitas yang jarang ditemukan di wilayah lain atau memiliki jangkauan pelayanan luas akan memiliki bobot lebih besar. Oleh karena itu,

Kabupaten Sleman dapat dikategorikan sebagai pusat pelayanan utama karena mampu menyediakan fasilitas yang lebih lengkap, lebih beragam, dan lebih strategis dibandingkan kabupaten lainnya. Kabupaten Sleman dapat disebut sebagai pusat pertumbuhan karena keberadaan fasilitas yang lengkap mendorong terkonsentrasinya aktivitas sosial dan ekonomi. Fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, pemerintahan, dan transportasi yang relatif lebih kuat akan menarik pergerakan penduduk dari wilayah lain. Masyarakat tidak hanya datang untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk bekerja, belajar, berobat, berdagang, atau mengakses layanan yang tidak tersedia di wilayah asalnya. Akibatnya, terjadi pemusatan aktivitas ekonomi, peningkatan mobilitas, pertumbuhan kawasan terbangun, serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.

Dengan demikian, Sleman dikatakan sebagai pusat pertumbuhan bukan hanya karena memiliki nilai indeks tertinggi, tetapi karena wilayah tersebut memiliki daya tarik dan daya pelayanan yang lebih besar. Semakin tinggi nilai sentralitas suatu wilayah, semakin kuat pula peran wilayah tersebut dalam memengaruhi perkembangan daerah sekitarnya. Pusat pertumbuhan merupakan lokasi yang menjadi konsentrasi berbagai sumber daya dan aktivitas pembangunan, termasuk fasilitas pelayanan, penduduk, investasi, modal, serta kegiatan ekonomi. Melalui keterkaitan fungsional antarwilayah, pertumbuhan yang terjadi di pusat tersebut dapat menyebar ke wilayah sekitarnya dalam bentuk peningkatan pelayanan, arus tenaga kerja, distribusi komoditas, dan aktivitas perdagangan yang semakin intensif. Berikut merupakan peta indeks sentralitas *Marshall* DIY.



Sumber : Hasil Analisis, 2026

**Gambar 18** Peta Indeks Sentralitas *Marshall* DIY

Sementara itu, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul yang berada pada Hierarki III dapat dimaknai sebagai wilayah dengan tingkat sentralitas lebih rendah dibandingkan Sleman. Wilayah ini bukan berarti tidak memiliki fasilitas, tetapi fasilitas yang dimiliki belum memiliki kelengkapan, keragaman, dan bobot pelayanan sebesar pusat utama. Fasilitas yang tersedia cenderung lebih berfungsi untuk memenuhi kebutuhan lokal masyarakat di wilayah masing-masing. Untuk fasilitas tertentu yang memiliki skala pelayanan lebih tinggi, masyarakat masih berpotensi bergantung pada Kabupaten Sleman sebagai pusat pelayanan utama. Wilayah Hierarki III dapat disebut sebagai wilayah *hinterland* atau wilayah pendukung karena memiliki hubungan ketergantungan terhadap pusat pelayanan yang lebih tinggi. *Hinterland* merupakan wilayah belakang yang mendukung keberadaan pusat pertumbuhan, baik sebagai daerah asal tenaga kerja, daerah permukiman, penyedia sumber daya, maupun pasar bagi kegiatan ekonomi pusat. Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul berperan sebagai wilayah yang terhubung dengan Sleman melalui arus pergerakan penduduk, barang, dan jasa. Masyarakat dari wilayah tersebut dapat melakukan perjalanan ke pusat utama untuk memperoleh pelayanan yang lebih lengkap.

Tingginya nilai sentralitas Sleman menyebabkan wilayah ini memiliki fungsi pelayanan yang lebih dominan. Dominasi tersebut mendorong terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi dan sosial di Sleman. Sebaliknya, nilai sentralitas yang lebih rendah pada Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul menyebabkan wilayah-wilayah tersebut memiliki peran pelayanan yang lebih terbatas. Keterbatasan ini dapat menimbulkan ketergantungan terhadap pusat pertumbuhan, terutama untuk fasilitas dengan skala pelayanan tinggi. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa penguatan fasilitas di wilayah *hinterland*, maka ketimpangan pelayanan antarwilayah dapat semakin terlihat.

Ketiadaan wilayah pada Hierarki II juga memiliki makna penting. Hal ini menunjukkan adanya jarak atau kesenjangan antara Kabupaten Sleman sebagai pusat pelayanan utama dengan kabupaten lain sebagai wilayah pendukung. Struktur pelayanan wilayah menjadi kurang berjenjang karena tidak terdapat wilayah perantara yang cukup kuat untuk berperan sebagai pusat pelayanan sekunder. Akibatnya, beban pelayanan cenderung terkonsentrasi pada Sleman, sementara wilayah lain masih berada pada posisi pendukung. Kondisi ini dapat meningkatkan arus pergerakan menuju Sleman dan memperkuat dominasi pusat utama. Dengan demikian, suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai pusat pelayanan apabila memiliki nilai sentralitas tinggi, fasilitas yang lengkap dan berbobot, serta mampu melayani kebutuhan penduduk di dalam dan di luar wilayahnya. Hasil analisis ini,

Kabupaten Sleman memenuhi kriteria tersebut karena memiliki kemampuan pelayanan paling besar dibandingkan kabupaten lainnya. Sementara itu, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul berfungsi sebagai *hinterland* yang mendukung aktivitas pusat pertumbuhan, tetapi masih memerlukan penguatan fasilitas agar ketergantungan terhadap Sleman dapat dikurangi. Berdasarkan hasil tersebut, arahan pengembangan wilayah sebaiknya tidak hanya memperkuat Kabupaten Sleman sebagai pusat pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan kapasitas pelayanan di Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Penguatan fasilitas pada wilayah Hierarki III penting untuk menciptakan struktur pelayanan yang lebih seimbang. Apabila fasilitas di wilayah *hinterland* ditingkatkan, maka pelayanan masyarakat menjadi lebih merata, ketergantungan terhadap pusat utama berkurang, dan peluang pertumbuhan ekonomi dapat tersebar ke wilayah lain.

## **4.2 Analisis Interaksi Spasial Wilayah**

Interaksi spasial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang terjadi antarwilayah akibat adanya perpindahan penduduk, barang, jasa, maupun informasi. Hubungan tersebut terbentuk karena setiap wilayah memiliki karakteristik, sumber daya, dan fungsi yang berbeda sehingga saling melengkapi satu sama lain. Interaksi spasial dapat diwujudkan melalui aktivitas perdagangan, mobilitas penduduk, komunikasi, serta berbagai bentuk pertukaran lainnya. Besarnya intensitas interaksi sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, terutama jarak dan tingkat aksesibilitas. Semakin dekat jarak antarwilayah dan semakin baik sarana transportasi yang tersedia, maka semakin tinggi pula peluang terjadinya interaksi antarwilayah tersebut (Hidayah dkk., 2023). Interaksi spasial dikaji menggunakan metode gravitasi, yaitu metode untuk mengukur kekuatan hubungan antarwilayah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan jarak antarwilayah.

### **4.2.1 Gravitasi**

Metode gravitasi merupakan salah satu metode dalam kajian regional yang digunakan untuk mengestimasi kekuatan interaksi antarwilayah. Pendekatan ini sering dijadikan sebagai metode awal dalam mengidentifikasi jangkauan pengaruh suatu wilayah karena mampu menggambarkan hubungan spasial berdasarkan ukuran wilayah dan jarak antarwilayah. Metode gravitasi diterapkan untuk mengetahui tingkat interaksi antara kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah pendukungnya (*hinterland*), sekaligus menentukan besarnya daerah pengaruh yang terbentuk. (Soepono, 2000). Metode gravitasi dilakukan untuk mengetahui besarnya interaksi antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya (*hinterland*) berdasarkan faktor jarak dan potensi

wilayah. Data yang digunakan untuk melakukan pengukuran jarak antar wilayah menggunakan alat *Google Maps* dan jumlah penduduk dari BPS Dalam Angka 2026. Jarak ditentukan berdasarkan kantor bupati pada masing-masing kabupaten. Visualisasi jarak terdapat pada lampiran 18.

Tahap pertama dalam pengolahan metode gravitasi adalah menentukan wilayah yang *berperan sebagai pusat pertumbuhan dan wilayah yang menjadi daerah sekitarnya atau hinterland*. Penentuan wilayah pusat pertumbuhan dapat didasarkan pada hasil metode sebelumnya, seperti metode skalogram atau indeks sentralitas *Marshall*. Wilayah yang memiliki hierarki tertinggi dijadikan sebagai wilayah pusat pertumbuhan, sedangkan wilayah dengan hierarki lebih rendah dijadikan sebagai wilayah pembanding atau wilayah *hinterland*. Wilayah pusat pertumbuhan merupakan Kabupaten Sleman berdasarkan hasil analisis pusat pelayanan yang telah dilakukan sebelumnya.

Tahap kedua adalah mengumpulkan data jumlah penduduk pada masing-masing wilayah. Data penduduk yang digunakan meliputi jumlah penduduk wilayah pusat pertumbuhan sebagai wilayah asal atau wilayah *i*, serta jumlah penduduk wilayah sekitarnya sebagai wilayah tujuan atau wilayah *j*. Tahap ketiga adalah menentukan jarak antarwilayah, yaitu jarak antara wilayah pusat pertumbuhan dengan masing-masing wilayah di sekitarnya. Jarak yang digunakan berupa jarak antar kantor bupati di masing-masing kabupaten. Data jarak tersebut dinyatakan dalam satuan kilometer. Penggunaan jarak menjadi penting karena jarak berfungsi sebagai faktor penghambat interaksi. Semakin jauh jarak antara dua wilayah, maka nilai interaksi yang dihasilkan akan semakin kecil. Tahap keempat adalah memasukkan data jumlah penduduk dan jarak ke dalam rumus metode gravitasi, yaitu:

$$A_{ij} = k \cdot \frac{P_i \cdot P_j}{(d_{ij})^2}$$

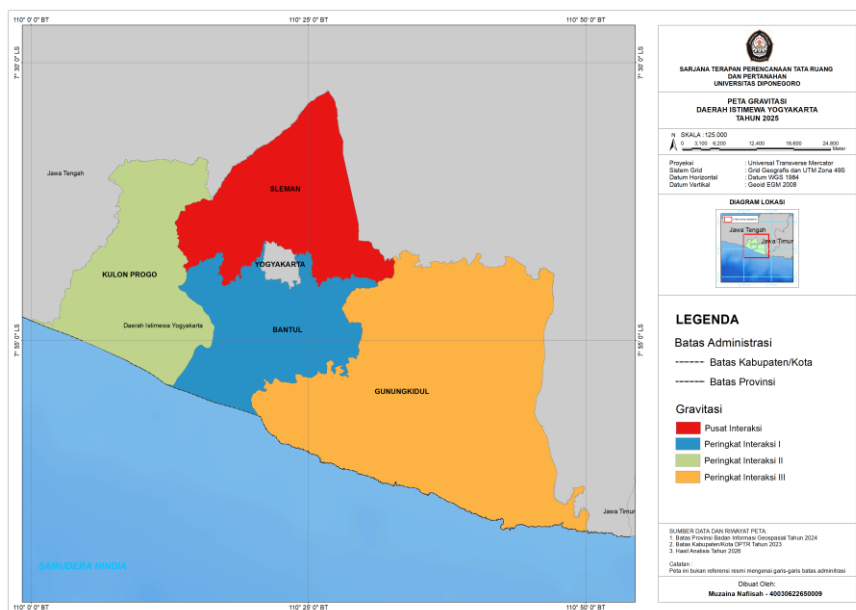
Tahap kelima adalah melakukan perhitungan nilai interaksi untuk setiap pasangan wilayah. Wilayah pusat pertumbuhan dihitung interaksinya dengan masing-masing wilayah *hinterland*. Nilai yang dihasilkan dari perhitungan metode gravitasi mencerminkan tingkat intensitas interaksi antara pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland*. Besarnya nilai interaksi menunjukkan kuatnya hubungan fungsional antarwilayah, sedangkan nilai yang lebih kecil mengindikasikan hubungan yang relatif lemah. Hasil penghitungan interaksi spasial antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Gravitasi

Kabupaten Pusat Pertumbuhan (i)	Kabupaten Tujuan (j)	Jarak (km) (i-j)	Besaran Interaksi Aij	Peringkat Interaksi
Sleman	Kabupaten Bantul	24	2,100,258,741	I
	Kabupaten Kulon Progo	35	430,796,224	II
	Kabupaten Gunungkidul	51	341,521,423	III

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan metode gravitasi pada lampiran 18 yang diringkas dalam Tabel 6, Kabupaten Sleman sebagai pusat pertumbuhan menunjukkan tingkat interaksi yang berbeda dengan wilayah-wilayah di sekitarnya, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Perbedaan nilai interaksi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* tidak berlangsung secara merata, melainkan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jarak antarwilayah, serta potensi kegiatan sosial ekonomi yang berkembang di masing-masing wilayah.



Sumber : Hasil Analisis, 2026

Gambar 19 Peta Gravitasi

Kabupaten Sleman dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan karena memiliki peran dominan dalam sistem pelayanan wilayah. Hal ini didukung oleh hasil analisis sebelumnya yang menunjukkan bahwa Sleman memiliki tingkat sentralitas dan kelengkapan fasilitas yang tinggi. Sebagai pusat pertumbuhan, Sleman berfungsi sebagai simpul utama kegiatan pelayanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, dan pergerakan penduduk. Wilayah yang memiliki fungsi seperti ini tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat di

dalam wilayahnya sendiri, tetapi juga menarik penduduk dari wilayah lain untuk melakukan berbagai aktivitas. Oleh karena itu, Sleman memiliki daya tarik wilayah yang kuat dan menjadi pusat orientasi bagi daerah-daerah sekitarnya.

Hasil metode gravitasi menunjukkan bahwa interaksi tertinggi terjadi antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan nilai interaksi sebesar 2.100.258.741 dan menempati peringkat I. Makna dari peringkat I adalah bahwa Bantul merupakan wilayah yang memiliki keterkaitan paling kuat dengan Sleman dibandingkan wilayah lainnya. Tingginya interaksi ini terutama dipengaruhi oleh jarak yang relatif dekat, yaitu 24 km, sehingga hambatan jarak menjadi lebih kecil. Kedekatan geografis tersebut memudahkan terjadinya pergerakan penduduk, barang, jasa, tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi antara kedua wilayah.

Peringkat I dalam interaksi gravitasi menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki hubungan fungsional yang sangat erat dengan pusat pertumbuhan. Artinya, aktivitas masyarakat Bantul berpotensi banyak terhubung dengan Sleman, baik untuk bekerja, belajar, mengakses fasilitas, melakukan kegiatan perdagangan, maupun memperoleh pelayanan yang lebih lengkap. Sebaliknya, Sleman juga memperoleh dukungan dari Bantul dalam bentuk tenaga kerja, permukiman, pasar, serta aktivitas ekonomi pendukung. Hubungan ini menunjukkan adanya keterkaitan pusat - *hinterland* yang kuat, di mana Sleman berperan sebagai pusat pelayanan utama, sedangkan Bantul menjadi wilayah yang paling intensif berinteraksi dengan pusat tersebut.

Berdasarkan nilai interaksi tertinggi tersebut, Kabupaten Bantul dapat dikatakan berpotensi sebagai sub pusat pertumbuhan. Bantul tidak ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan utama karena tingkat kelengkapan fasilitas dan sentralitasnya masih berada di bawah Sleman. Namun, Bantul memiliki posisi penting karena menjadi wilayah *hinterland* dengan hubungan paling kuat terhadap pusat utama. Sebagai sub pusat pertumbuhan, Bantul berperan sebagai wilayah perantara yang dapat menerima limpahan aktivitas dari Sleman, sekaligus membantu menyebarkan pengaruh pertumbuhan ke wilayah sekitarnya. Dengan kata lain, Bantul dapat menjadi simpul pertumbuhan kedua yang mendukung fungsi Sleman agar aktivitas pelayanan dan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada satu pusat.

Dampak dari kuatnya interaksi Sleman - Bantul adalah meningkatnya peluang pertumbuhan di Kabupaten Bantul. Kedekatan dan tingginya hubungan fungsional dapat mendorong perkembangan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, transportasi, serta kegiatan ekonomi lokal. Bantul dapat memperoleh efek limpahan dari pertumbuhan Sleman, misalnya melalui peningkatan mobilitas penduduk, perluasan pasar, peningkatan kebutuhan

lahan permukiman, dan berkembangnya aktivitas pendukung pusat pertumbuhan. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga dapat menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur, peningkatan kebutuhan transportasi, perubahan penggunaan lahan, dan potensi ketergantungan terhadap Sleman apabila kapasitas pelayanan di Bantul tidak diperkuat.

Pada peringkat II, interaksi antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai sebesar 430,796,224 dengan jarak 35 km. Nilai ini menunjukkan bahwa Kulon Progo memiliki hubungan dengan Sleman, tetapi intensitasnya lebih rendah dibandingkan Bantul. Makna dari peringkat II adalah bahwa Kulon Progo masih termasuk wilayah *hinterland* yang terhubung dengan pusat pertumbuhan, namun hubungan fungsionalnya tidak sekuat Bantul. Jarak yang lebih jauh menyebabkan hambatan interaksi menjadi lebih besar, sehingga pergerakan penduduk, barang, dan jasa tidak seintensif wilayah yang lebih dekat. Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah peringkat II dapat dipahami sebagai *hinterland* dengan keterkaitan sedang. Wilayah ini masih memperoleh pengaruh dari Sleman sebagai pusat pertumbuhan, tetapi pengaruh tersebut cenderung lebih terbatas. Dampaknya, pertumbuhan yang menyebar dari Sleman ke Kulon Progo tidak sekuat penyebaran ke Bantul. Oleh karena itu, Kulon Progo membutuhkan penguatan aksesibilitas dan fasilitas pelayanan agar hubungan dengan pusat pertumbuhan menjadi lebih efektif. Apabila konektivitas dan fasilitas wilayah meningkat, maka Kulon Progo dapat memperbesar perannya dalam sistem pelayanan regional dan tidak hanya bergantung pada pusat utama.

Pada peringkat III, Kabupaten Gunungkidul memiliki nilai interaksi terendah, yaitu 341,521,423, dengan jarak paling jauh, yaitu 51 km. Makna dari peringkat III adalah bahwa Gunungkidul memiliki hubungan paling lemah dengan Sleman dibandingkan wilayah lainnya. Rendahnya nilai interaksi ini menunjukkan bahwa pengaruh Sleman sebagai pusat pertumbuhan terhadap Gunungkidul relatif lebih terbatas. Faktor jarak menjadi penyebab utama karena semakin jauh jarak antarwilayah, semakin besar hambatan untuk melakukan interaksi. Metode gravitasi, jarak memiliki pengaruh besar karena menjadi pembagi yang dikuadratkan, sehingga sedikit peningkatan jarak dapat menurunkan nilai interaksi secara signifikan.

Kabupaten Gunungkidul dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai wilayah *hinterland* dengan tingkat ketergantungan yang ada, tetapi intensitas hubungannya lebih rendah. Wilayah ini masih membutuhkan hubungan dengan pusat pertumbuhan untuk mengakses fasilitas tertentu, tetapi jarak yang jauh menyebabkan interaksi tidak berlangsung sekuat Bantul dan Kulon Progo. Dampaknya, penyebaran pengaruh pertumbuhan dari Sleman ke Gunungkidul menjadi lebih lambat. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan

fasilitas dan aksesibilitas, Gunungkidul berpotensi mengalami keterbatasan dalam menerima efek pertumbuhan dari pusat utama.

Hasil analisis interaksi spasial wilayah menunjukkan bahwa semakin dekat jarak suatu wilayah dengan pusat pertumbuhan dan semakin besar potensi penduduknya, maka semakin tinggi nilai interaksi yang terbentuk. Kabupaten Bantul memiliki nilai interaksi tertinggi karena jaraknya paling dekat dengan Sleman, sehingga hubungan antarwilayah menjadi lebih intensif. Kulon Progo memiliki nilai interaksi sedang karena jaraknya lebih jauh, sedangkan Gunungkidul memiliki nilai terendah karena jaraknya paling jauh. Dengan demikian, jarak menjadi faktor penghambat utama dalam hubungan spasial, sedangkan jumlah penduduk menjadi faktor pendorong interaksi.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan tidak dapat berdiri sendiri. Sleman sebagai pusat pertumbuhan membutuhkan wilayah *hinterland* sebagai daerah pendukung. Wilayah *hinterland* berperan sebagai penyedia tenaga kerja, kawasan permukiman, pasar bagi barang dan jasa, serta wilayah yang menerima pengaruh dari aktivitas pusat. Sebaliknya, wilayah *hinterland* juga bergantung pada pusat pertumbuhan untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan yang lebih lengkap. Hubungan timbal balik inilah yang membentuk sistem pelayanan regional.

Dengan demikian, hasil analisis ini memperkuat posisi Kabupaten Sleman sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan utama karena memiliki daya tarik yang kuat terhadap wilayah sekitarnya. Kabupaten Bantul menjadi wilayah dengan keterkaitan paling kuat dan berpotensi sebagai sub pusat pertumbuhan karena mampu menjembatani hubungan antara pusat utama dengan wilayah lain. Sementara itu, Kulon Progo dan Gunungkidul tetap berperan sebagai *hinterland*, tetapi dengan tingkat interaksi yang lebih rendah. Oleh karena itu, arahan pengembangan wilayah sebaiknya tidak hanya berpusat pada Sleman, tetapi juga memperkuat Bantul sebagai sub pusat pertumbuhan serta meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas di Kulon Progo dan Gunungkidul agar pemerataan pertumbuhan wilayah dapat lebih optimal.

### **4.3 Analisis Wilayah Potensial**

Penentuan wilayah potensial dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kapasitas ekonomi daerah serta mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki keunggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan Tipologi *Klassen* dan *Location Quotient* (LQ). Tipologi *Klassen* digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menggambarkan tingkat perkembangan ekonomi masing-masing

daerah. Sementara itu, analisis LQ diterapkan untuk mengetahui sektor basis yang menjadi keunggulan ekonomi suatu wilayah. Nilai LQ yang melebihi satu mengindikasikan bahwa sektor tersebut memiliki spesialisasi dan daya saing yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah acuan, sehingga berpotensi menjadi sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui kombinasi kedua metode tersebut, penentuan wilayah potensial tidak hanya didasarkan pada kondisi pertumbuhan ekonominya, tetapi juga pada keberadaan sektor unggulan yang dapat mendorong peningkatan PDRB dan mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Rajab, 2025).

#### 4.3.1 Tipologi *Klassen*

Tipologi *Klassen* merupakan salah satu metode analisis regional yang digunakan untuk menganalisis tingkat perkembangan ekonomi antarwilayah berdasarkan pola pertumbuhan dan tingkat pendapatannya. Analisis ini memanfaatkan dua indikator utama, yaitu laju pertumbuhan ekonomi daerah ( $r$ ) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita ( $Y$ ). Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai sumbu vertikal, sedangkan rata-rata PDRB per kapita digunakan sebagai sumbu horizontal. Berdasarkan perbandingan kedua indikator tersebut, wilayah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori perkembangan ekonomi. Kuadran I menunjukkan wilayah yang maju dan tumbuh cepat, Kuadran II menggambarkan wilayah yang berkembang pesat, Kuadran III menunjukkan wilayah yang maju tetapi mengalami tekanan pertumbuhan, sedangkan Kuadran IV mencerminkan wilayah yang relatif tertinggal. Data rata-rata PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

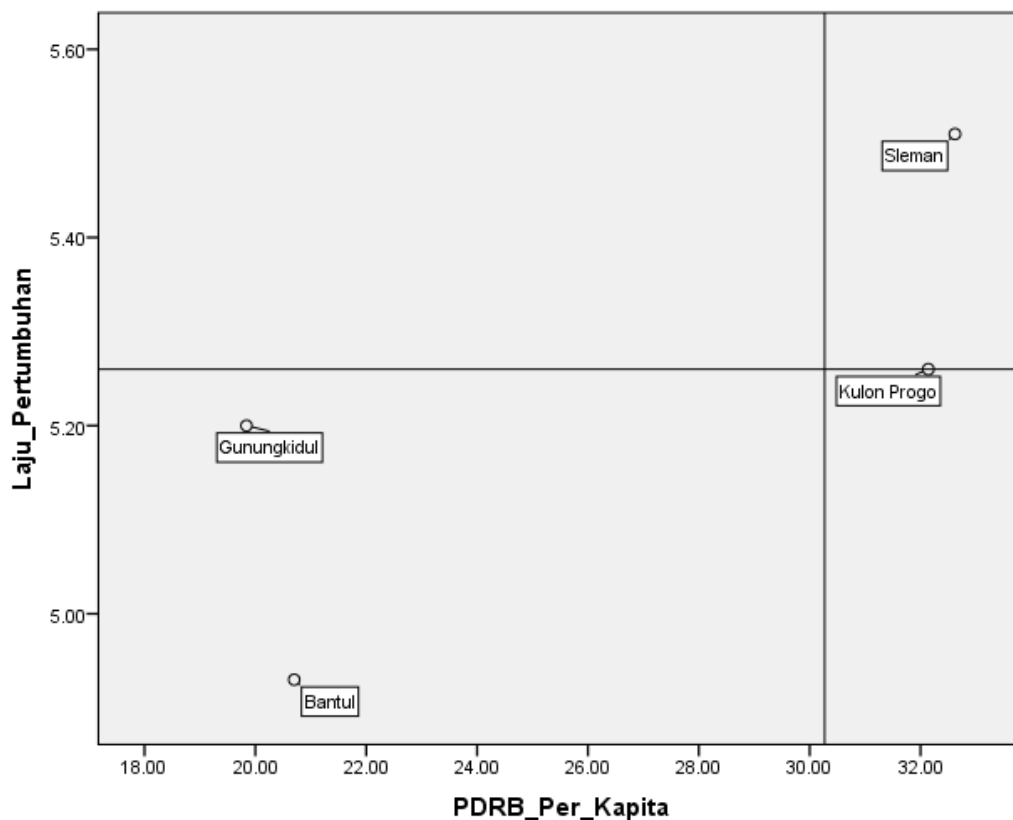
Tabel 7. Rata-Rata PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten	PDRB per kapita (dalam juta) (X)		Laju Pertumbuhan Ekonomi(Y)	
	Wilayah Studi (Yi)	DIY (Y)	Wilayah Studi(ri)	DIY (r)
Sleman	32,62	30,27	5,51	5,26
Kulon Progo	32,14	30,27	5,25	5,26
Bantul	20,70	30,27	4,93	5,26
Gunungkidul	19,84	30,27	5,20	5,26

Sumber : Hasil Analisis, 2026

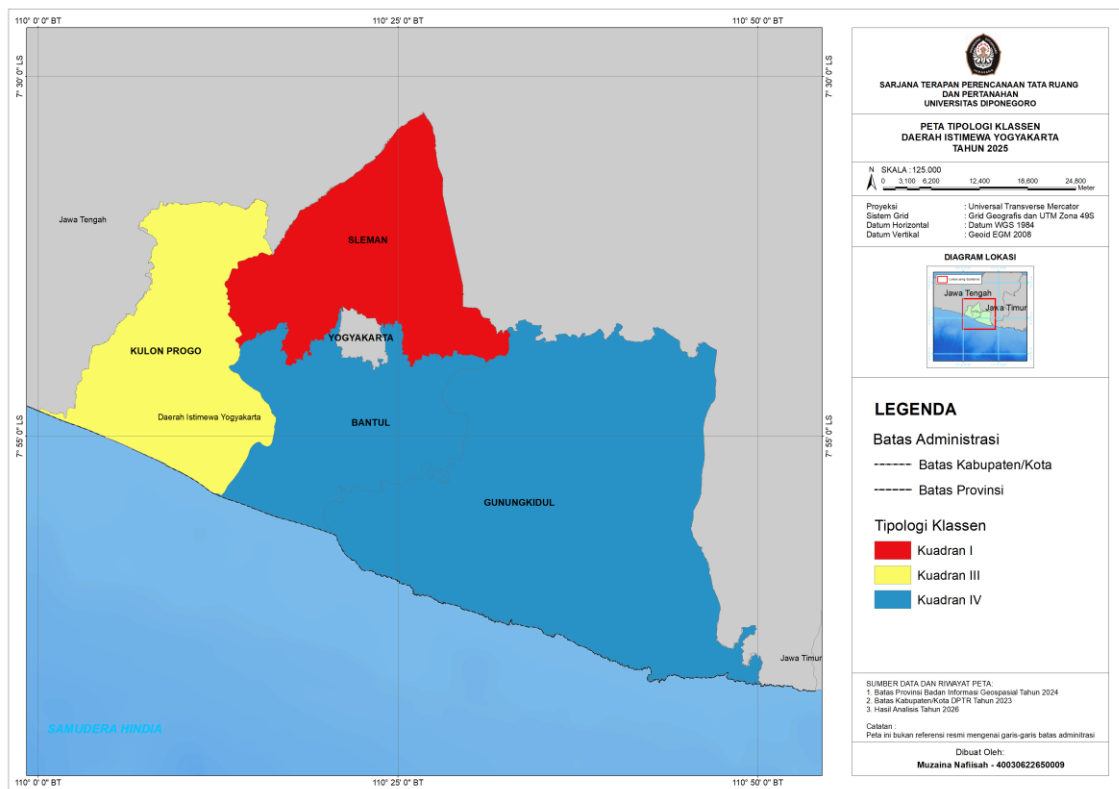
Penerapan Tipologi *Klassen* pada periode 2021–2025 bertujuan untuk menghasilkan analisis yang lebih representatif terkait dinamika pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan wilayah. Dengan menggunakan data dalam rentang waktu yang lebih panjang, pola

perkembangan ekonomi antarwilayah dapat diamati secara lebih menyeluruh sehingga hasil klasifikasi wilayah menjadi lebih reliabel. Rentang waktu lima tahun ini memungkinkan analisis melihat kecenderungan perkembangan ekonomi secara lebih akurat, termasuk dinamika pemulihan akibat perubahan kondisi eksternal. Metode ini dilakukan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan karena indikator tersebut dapat menunjukkan kinerja perekonomian secara riil. Dengan menghilangkan pengaruh perubahan tingkat harga, data yang dihasilkan lebih tepat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, perbandingan antarwaktu menjadi lebih valid dan hasil klasifikasi wilayah yang diperoleh menjadi lebih objektif. Visualisasi tipologi *Klassen* tersebut dilakukan menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). SPSS merupakan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menganalisis, mengolah, dan memvisualisasikan data statistik. Terdapat penjelasan mengenai langkah langkah dalam memvisualisasikan hasil tersebut pada lampiran 19.



Sumber : Hasil Analisis, 2026

Gambar 20. Hasil Tipologi *Klassen*



Sumber : Hasil Analisis, 2026

Gambar 21. Peta Tipologi *Klassen* DIY

Berdasarkan hasil analisis Tipologi *Klassen*, wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya terdistribusi pada Kuadran I, Kuadran III, dan Kuadran IV. Tidak terdapat wilayah yang masuk ke dalam Kuadran II (wilayah maju tetapi tertekan). Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada kabupaten di DIY yang memiliki tingkat PDRB per kapita di atas rata-rata wilayah namun memiliki laju pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata wilayah. Dengan kata lain, kabupaten yang memiliki tingkat kemajuan ekonomi relatif tinggi masih mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonominya atau bahkan tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata wilayah. Oleh karena itu, karakteristik wilayah maju tetapi mengalami perlambatan pertumbuhan sebagaimana yang digambarkan pada Kuadran II tidak ditemukan dalam wilayah kajian. Hasil ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian DIY cenderung terpolarisasi antara wilayah yang telah maju dan tumbuh cepat, wilayah yang sedang berkembang, serta wilayah yang masih relatif tertinggal.

Hasil metode Tipologi *Klassen* yang divisualisasi melalui peta menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman berada pada Kuadran I, yang merepresentasikan wilayah maju dan berkembang pesat. Posisi ini diperoleh karena Kabupaten Sleman memiliki rata-rata PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Wilayah yang termasuk dalam kuadran tersebut umumnya memiliki struktur ekonomi yang

kuat, tingkat produktivitas yang tinggi, serta kemampuan yang baik dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Kabupaten Sleman dapat dianggap sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kesejahteraan dan kinerja ekonomi yang relatif unggul di Provinsi DIY. Posisi Sleman pada Kuadran I memperkuat perannya sebagai pusat pertumbuhan utama. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila memiliki kemampuan untuk menarik aktivitas ekonomi, menggerakkan sektor-sektor produktif, menyediakan fasilitas pelayanan, serta memberikan pengaruh terhadap wilayah sekitarnya. Sleman memiliki daya tarik yang besar karena didukung oleh kondisi ekonomi yang lebih maju, pertumbuhan yang tinggi, serta kelengkapan fasilitas pelayanan sebagaimana juga terlihat dari hasil skalogram dan indeks sentralitas. Dengan demikian, Sleman tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi pelayanan yang kuat.

Dampak dari posisi Sleman sebagai wilayah Kuadran I adalah semakin kuatnya konsentrasi aktivitas ekonomi, investasi, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan permukiman di wilayah tersebut. Tingginya pertumbuhan ekonomi menyebabkan Sleman menjadi tujuan pergerakan penduduk dari wilayah lain, baik untuk bekerja, belajar, berobat, berdagang, maupun mengakses fasilitas yang lebih lengkap. Kondisi ini menjadikan Sleman sebagai motor penggerak ekonomi wilayah studi. Namun, apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan ke wilayah lain, dominasi Sleman juga dapat memperlebar ketimpangan antarwilayah karena aktivitas ekonomi dan pelayanan cenderung terpusat pada satu wilayah utama.

Hasil analisis menempatkan Kabupaten Kulon Progo pada Kuadran III, yaitu kategori daerah maju tetapi tertekan. Posisi ini mencerminkan bahwa nilai PDRB per kapita yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo telah melampaui rata-rata DIY, namun capaian laju pertumbuhan ekonominya masih berada di bawah rata-rata provinsi. Dengan demikian, wilayah ini memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang relatif baik, tetapi menghadapi tantangan dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Secara makna, wilayah Kuadran III bukan termasuk wilayah tertinggal, melainkan wilayah yang telah memiliki basis ekonomi relatif baik. Namun, pertumbuhannya belum berjalan secepat wilayah yang berada pada Kuadran I. Dengan kata lain, Kulon Progo memiliki kapasitas ekonomi yang cukup kuat, tetapi sedang menghadapi perlambatan atau tekanan pertumbuhan. Posisi Kulon Progo pada Kuadran III penting untuk dianalisis karena menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi sebagai sub pusat pertumbuhan. PDRB

per kapita yang berada di atas rata-rata DIY menandakan bahwa Kulon Progo memiliki nilai ekonomi wilayah yang relatif tinggi. Hal ini berarti kemampuan ekonomi wilayah tersebut sudah cukup kuat untuk mendukung perkembangan aktivitas masyarakat. Meskipun laju pertumbuhannya sedikit di bawah rata-rata, kondisi tersebut tidak menghilangkan potensi Kulon Progo sebagai pusat pertumbuhan sekunder. Justru, posisi ini menunjukkan bahwa Kulon Progo membutuhkan dorongan pembangunan agar potensi ekonominya dapat berkembang lebih optimal.

Tipologi *Klassen* memperkuat posisi Kulon Progo sebagai sub pusat pertumbuhan karena hasilnya menunjukkan bahwa Kulon Progo bukan wilayah dengan basis ekonomi lemah. Berbeda dengan wilayah Kuadran IV, Kulon Progo telah memiliki PDRB per kapita yang tinggi. Apabila dikaitkan dengan hasil skalogram, Kulon Progo juga memiliki kelengkapan fasilitas yang relatif baik sehingga dapat mendukung fungsi pelayanan wilayah. Dengan demikian, Kulon Progo memiliki dua dasar penting sebagai sub pusat pertumbuhan, yaitu kapasitas ekonomi yang cukup tinggi berdasarkan Tipologi *Klassen* dan dukungan fasilitas berdasarkan skalogram.

Kulon Progo dapat dikatakan sebagai sub pusat pertumbuhan karena wilayah ini memiliki potensi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Sleman sebagai pusat utama. Sebagai sub pusat pertumbuhan, Kulon Progo dapat berperan sebagai pusat pelayanan dan pusat aktivitas ekonomi pada bagian barat DIY. Peran ini penting agar pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di Sleman, tetapi juga menyebar ke wilayah lain. Dampaknya, Kulon Progo berpotensi menjadi wilayah penerima limpahan aktivitas ekonomi, investasi, perdagangan, jasa, dan transportasi. Jika potensi tersebut dikembangkan secara tepat, Kulon Progo dapat menjadi pengimbang struktur ruang wilayah DIY. Namun, karena Kulon Progo masih berada pada Kuadran III, maka terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Laju pertumbuhan ekonomi yang sedikit di bawah rata-rata menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah ini belum sepenuhnya bergerak cepat. Penyebabnya dapat berkaitan dengan belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah, belum meratanya perkembangan sektor ekonomi, atau masih terbatasnya keterkaitan ekonomi dengan wilayah lain. Oleh karena itu, Kulon Progo memerlukan strategi penguatan ekonomi, peningkatan investasi, pengembangan sektor unggulan, dan peningkatan aksesibilitas agar dapat naik menjadi wilayah yang tidak hanya maju, tetapi juga cepat tumbuh.

Sementara itu, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam Kuadran IV, yaitu daerah relatif tertinggal. Posisi ini menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata DIY. Secara makna, wilayah Kuadran IV memiliki kapasitas ekonomi yang masih rendah dan pertumbuhan yang belum cukup kuat untuk mengejar wilayah lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa Bantul dan Gunungkidul masih menghadapi keterbatasan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah yang berada pada Kuadran IV dapat dikategorikan sebagai wilayah *hinterland* atau wilayah pendukung. *Hinterland* bukan berarti wilayah tersebut tidak penting, tetapi menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih memiliki ketergantungan terhadap pusat pertumbuhan yang lebih kuat. Bantul dan Gunungkidul berperan sebagai wilayah pendukung bagi pusat pertumbuhan, baik sebagai daerah permukiman, penyedia tenaga kerja, pasar bagi barang dan jasa, maupun wilayah yang menerima pengaruh dari aktivitas pusat. Masyarakat dari wilayah *hinterland* cenderung bergerak menuju pusat pertumbuhan untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pelayanan lain yang lebih lengkap.

Dampak dari posisi Bantul dan Gunungkidul pada Kuadran IV adalah rendahnya kemampuan wilayah dalam mendorong pertumbuhan secara mandiri. Rendahnya PDRB per kapita menunjukkan bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan per penduduk masih lebih kecil dibandingkan rata-rata DIY. Sementara itu, laju pertumbuhan yang rendah menunjukkan bahwa proses peningkatan ekonomi belum berjalan cepat. Akibatnya, kedua wilayah tersebut berpotensi mengalami ketergantungan terhadap pusat pertumbuhan, terutama Sleman dan sub pusat pertumbuhan seperti Kulon Progo. Apabila kondisi ini tidak diatasi, maka ketimpangan ekonomi antarwilayah dapat semakin kuat.

Wilayah dengan PDRB per kapita tinggi dan pertumbuhan tinggi seperti Sleman akan memiliki daya tarik yang besar terhadap aktivitas ekonomi dan penduduk. Daya tarik tersebut mendorong masuknya investasi, berkembangnya fasilitas, serta meningkatnya pergerakan barang dan jasa. Akibatnya, wilayah tersebut semakin kuat sebagai pusat pertumbuhan. Sebaliknya, wilayah dengan PDRB per kapita rendah dan pertumbuhan rendah akan memiliki daya saing ekonomi yang lebih lemah. Keterbatasan tersebut menyebabkan wilayah tersebut lebih bergantung pada pusat pertumbuhan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dan ekonomi. Dengan demikian, hasil tipologi *Klassen* memperlihatkan adanya struktur ekonomi wilayah yang tidak seimbang. Sleman berada pada

posisi paling kuat sebagai pusat pertumbuhan utama karena memiliki tingkat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kulon Progo berada pada posisi strategis sebagai wilayah maju tetapi tertekan, sehingga dapat diperkuat sebagai sub pusat pertumbuhan. Sementara itu, Bantul dan Gunungkidul masih berada pada posisi *hinterland* yang membutuhkan penguatan ekonomi dan pelayanan agar tidak terus bergantung pada pusat utama.

Berdasarkan hasil tersebut, arahan pengembangan wilayah sebaiknya tidak hanya berfokus pada penguatan Sleman sebagai pusat pertumbuhan utama, tetapi juga mendorong Kulon Progo sebagai sub pusat pertumbuhan. Penguatan Kulon Progo penting untuk menciptakan keseimbangan pembangunan wilayah, terutama di bagian barat DIY. Selain itu, Bantul dan Gunungkidul perlu didorong melalui peningkatan fasilitas pelayanan, aksesibilitas, investasi, dan pengembangan sektor ekonomi lokal agar mampu meningkatkan PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonominya. Dengan strategi tersebut, pertumbuhan wilayah dapat menyebar lebih merata dan ketergantungan terhadap Sleman dapat dikurangi.

#### **4.3.2 Location Quotient (LQ)**

Metode *Location Quotient* (LQ) diterapkan untuk menganalisis sektor unggulan dan sektor nonunggulan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis dilakukan menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan berdasarkan lapangan usaha yang tersedia pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi selama kurun waktu lima tahun. Penggunaan data tersebut memungkinkan penilaian terhadap tingkat spesialisasi dan keunggulan komparatif sektor ekonomi di setiap wilayah. Penggunaan data harga konstan bertujuan agar pertumbuhan ekonomi yang dianalisis mencerminkan kondisi riil tanpa dipengaruhi oleh inflasi maupun deflasi. Selain itu, penggunaan data selama lima tahun dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan ekonomi yang lebih stabil dan representatif sehingga mampu mengurangi pengaruh fluktuasi ekonomi jangka pendek.

Tahap pertama dalam metode LQ yaitu mengumpulkan data PDRB masing-masing sektor ekonomi pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Data tersebut terdiri dari PDRB sektor di wilayah kabupaten/kota (PDRB ik), total PDRB kabupaten/kota (PDRB it), PDRB sektor di tingkat provinsi (PDRB nk), dan total PDRB provinsi (PDRB nt. Tahap analisis berikutnya adalah menghitung persentase kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap total PDRB wilayah. Pada tingkat kabupaten/kota, kontribusi sektor diperoleh dari perbandingan

antara nilai PDRB sektor dengan total PDRB wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya, dilakukan perhitungan serupa pada tingkat provinsi dengan membandingkan nilai PDRB sektor terhadap total PDRB provinsi. Nilai proporsi yang dihasilkan menjadi dasar dalam proses identifikasi sektor basis dan sektor non basis. Hasil kedua proporsi tersebut kemudian digunakan dalam perhitungan nilai *Location Quotient* (LQ) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LQ = \frac{\left(\frac{PDRB_{ik}}{PDRB_{it}}\right)}{\left(\frac{PDRB_{nk}}{PDRB_{nt}}\right)}$$

Tahap interpretasi hasil analisis LQ dilakukan untuk menentukan status suatu sektor sebagai sektor basis atau non basis. Apabila nilai LQ melebihi angka satu, maka sektor tersebut dianggap sebagai sektor basis karena peranannya dalam perekonomian daerah lebih dominan dibandingkan kontribusi sektor yang sama pada tingkat provinsi. Dengan demikian, sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi menjadi penggerak utama perekonomian wilayah. Sektor basis mampu memenuhi kebutuhan wilayah sendiri bahkan berpotensi melayani wilayah lain sehingga dapat menghasilkan aliran pendapatan masuk (*monetary inflow*). Nilai LQ = 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut termasuk sektor non basis karena kontribusinya relatif sama dengan tingkat provinsi dan hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayah sendiri. Nilai LQ yang berada di bawah satu mengindikasikan bahwa suatu sektor termasuk dalam kategori nonbasis. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat spesialisasi sektor tersebut lebih rendah dibandingkan wilayah acuan, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian daerah juga relatif kecil, berdasarkan kondisi demikian, wilayah cenderung bergantung pada produksi dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan sektor terkait, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya aliran pendapatan keluar wilayah (*monetary outflow*). Berikut merupakan sektor basis dan non basis di DIY.

**Tabel 8. Basis dan Non Basis**

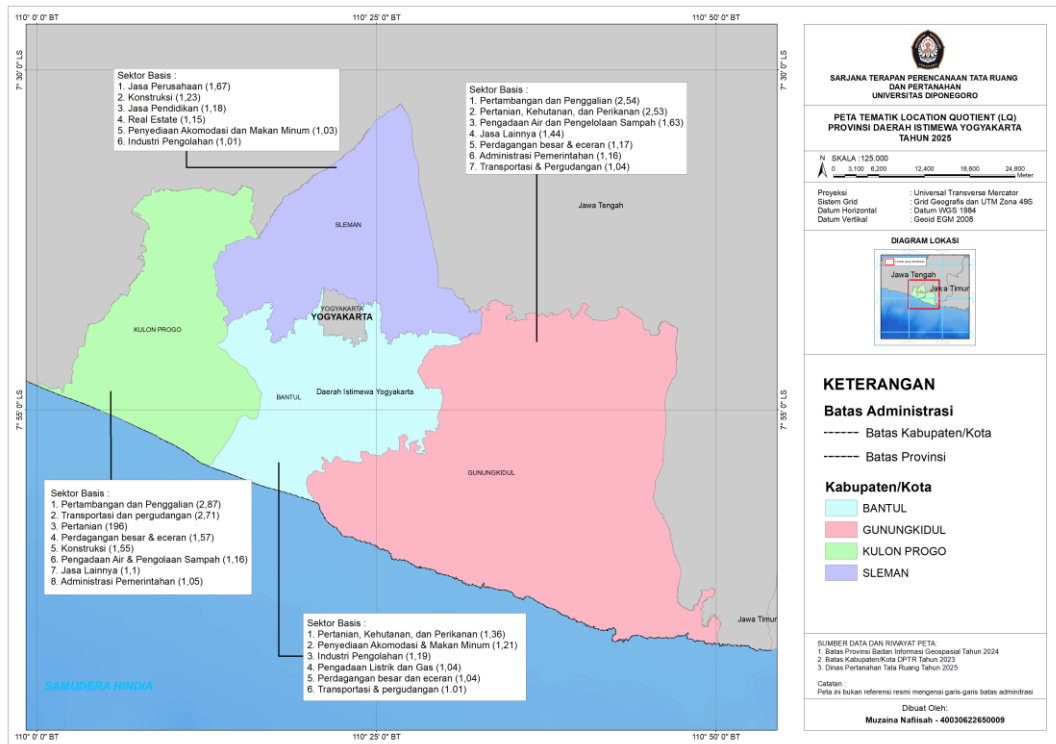
Wilayah	Basis		Non Basis	
	Sleman	Jasa Perusahaan	1,67	Informasi dan Komunikasi
Konstruksi		1,23	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93
Jasa Pendidikan		1,18	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,91
Real Estate		1,15	Jasa lainnya	0,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		1,03	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86
Industri Pengolahan		1,01	Pengadaan Listrik dan Gas	0,82
			Transportasi dan Pergudangan	0,8
			Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,8

Wilayah	Basis		Non Basis	
			Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,78
			Pertambangan dan Pengegalian	0,71
			Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,46
Bantul	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,36	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,94
	Pertambangan dan Pengegalian	1,21	Transportasi dan Pergudangan	0,94
	Industri Pengolahan	1,19	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,93
	Pengadaan Listrik dan Gas	1,04	Informasi dan Komunikasi	0,93
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,04	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,9
	Konstruksi	1,01	Real Estate	0,84
			Jasa Perusahaan	0,83
			Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,82
			Jasa Pendidikan	0,76
			Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74
		Jasa lainnya	0,48	
Kulon Progo	Pertambangan dan Pengegalian	2,87	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,91
	Industri Pengolahan	2,71	Informasi dan Komunikasi	0,77
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,96	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,57
	Pengadaan Listrik dan Gas	1,57	Real Estate	0,51
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,55	Jasa Perusahaan	0,5
	Konstruksi	1,16	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,43
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,1	Jasa Pendidikan	0,41
	Transportasi dan Pergudangan	1,05	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39
			Jasa lainnya	0,26
Gunungkidul	Pertambangan dan Pengegalian	2,54	Konstruksi	0,93
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,53	Informasi dan Komunikasi	0,9
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,63	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82
	Jasa lainnya	1,44	Jasa Pendidikan	0,76
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,17	Industri Pengolahan	0,74
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,16	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,68
	Transportasi dan Pergudangan	1,04	Pengadaan Listrik dan Gas	0,66
			Jasa Keuangan dan Asuransi	0,59
			Real Estate	0,51
		Jasa Perusahaan	0,44	

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) pada Tabel 9 menunjukkan klasifikasi sektor ekonomi ke dalam kategori basis dan nonbasis di setiap kabupaten/kota. Interpretasi nilai LQ dilakukan dengan membandingkan tingkat spesialisasi suatu sektor terhadap wilayah referensi. Nilai LQ di atas satu menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif dan dapat dikategorikan sebagai sektor basis. Sementara itu, nilai LQ sama dengan satu menunjukkan tingkat spesialisasi yang setara dengan wilayah acuan, sedangkan nilai di bawah satu mengindikasikan bahwa sektor tersebut belum berkembang secara optimal. Lebih jauh, analisis LQ tidak hanya digunakan untuk menentukan sektor unggulan, tetapi juga untuk memahami kontribusi sektor dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi, memperbesar nilai tambah regional, dan memengaruhi pola ketimpangan pembangunan antarwilayah.



Sumber : Hasil Analisis, 2026

**Gambar 22. Peta Location Quotient DIY**

Pada Kabupaten Sleman, sektor basis meliputi jasa perusahaan, konstruksi, jasa pendidikan, real estate, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan. Dominasi sektor jasa menunjukkan bahwa struktur ekonomi Sleman berkembang sebagai wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang didominasi sektor tersier. Tingginya nilai LQ pada sektor jasa perusahaan dan jasa pendidikan menunjukkan bahwa Sleman memiliki peran penting sebagai pusat pelayanan pendidikan, jasa, dan aktivitas ekonomi di DIY. Kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan perguruan tinggi, pusat perdagangan, kawasan permukiman, dan aktivitas pariwisata yang berkembang pesat. Perkembangan sektor-sektor tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan PDRB karena sektor jasa memiliki nilai tambah ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu, berkembangnya sektor jasa dan konstruksi di Sleman juga memicu pertumbuhan sektor lain seperti perdagangan, transportasi, kuliner, dan properti. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antar sektor yang cukup kuat. Akan tetapi, konsentrasi aktivitas ekonomi di Sleman juga berpotensi menimbulkan ketimpangan wilayah apabila pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada wilayah inti perkotaan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan wilayah lain menjadi bergantung pada Sleman sebagai pusat aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan sektor basis di Sleman perlu diimbangi

dengan pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas dengan wilayah sekitarnya agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat menyebar secara lebih merata.

Di Kabupaten Bantul, sektor basis unggulannya meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan, penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta pengadaan listrik dan gas. Struktur ekonomi tersebut menunjukkan bahwa Bantul memiliki kombinasi sektor primer, sekunder, dan tersier yang cukup seimbang. Tingginya nilai LQ pada sektor pertanian menunjukkan bahwa Bantul mampu menghasilkan surplus produksi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga dipasarkan ke wilayah lain. Selain itu, keberadaan industri pengolahan menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah terhadap hasil pertanian dan produk lokal masyarakat. Keberadaan sektor-sektor unggulan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan *output* regional dan penyerapan tenaga kerja. Karakteristik sektor pertanian dan industri pengolahan yang relatif padat karya memungkinkan keterlibatan masyarakat lokal secara lebih luas. Dengan demikian, pengembangan sektor basis di Kabupaten Bantul dapat menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Namun demikian, agar sektor basis tersebut dapat berkembang lebih optimal, diperlukan dukungan berupa penguatan UMKM, pengembangan agroindustri, peningkatan kualitas infrastruktur distribusi, dan perluasan akses pasar sehingga hasil produksi masyarakat dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Pada Kabupaten Kulon Progo, sektor basis yang menonjol meliputi pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, pertanian, perdagangan, konstruksi, pengadaan air dan pengelolaan sampah, jasa lainnya, serta administrasi pemerintahan. Tingginya nilai LQ pada sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan bahwa Kulon Progo memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan distribusi ekonomi wilayah. Kondisi ini berkaitan dengan berkembangnya pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aksesibilitas wilayah. Perkembangan sektor transportasi, perdagangan, dan konstruksi menunjukkan bahwa Kulon Progo sedang mengalami transformasi ekonomi yang cukup signifikan. Kondisi tersebut berpotensi menjadikan Kulon Progo sebagai sub-pusat pertumbuhan ekonomi baru di DIY. Dampaknya tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat hubungan antarwilayah melalui peningkatan mobilitas barang, jasa, dan penduduk. Akan tetapi, pembangunan yang terlalu terpusat pada kawasan tertentu dapat memunculkan ketimpangan baru apabila masyarakat lokal tidak

mampu terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berkembang. Oleh karena itu, pengembangan sektor basis di Kulon Progo perlu disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, dan pemerataan akses pembangunan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih luas.

Kabupaten Gunungkidul memiliki keunggulan pada beberapa sektor ekonomi, antara lain pertanian, pertambangan dan penggalan, pengadaan air dan pengelolaan sampah, perdagangan, transportasi dan pergudangan, administrasi pemerintahan, serta jasa lainnya. Keberadaan sektor-sektor tersebut sebagai sektor basis menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih banyak ditopang oleh sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi berbasis wilayah. Tingginya nilai LQ pada sektor pertanian dan pertambangan menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut menjadi penggerak utama ekonomi wilayah. Meskipun sektor primer mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, ketergantungan yang terlalu besar terhadap sektor tersebut memiliki beberapa kelemahan. Produktivitas sektor primer cenderung lebih rendah dan sangat dipengaruhi kondisi alam maupun fluktuasi harga pasar. Akibatnya, peningkatan PDRB belum tentu diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, pembangunan ekonomi Kabupaten Gunungkidul perlu diarahkan pada pengembangan sektor-sektor yang mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Pengembangan agroindustri, industri pengolahan komoditas pertanian, dan sektor pariwisata berbasis sumber daya alam dapat menjadi alternatif strategis untuk memperluas struktur ekonomi wilayah. Dengan demikian, ketergantungan terhadap sektor primer dapat dikurangi dan perekonomian daerah menjadi lebih berkelanjutan.

Hasil metode LQ memiliki peran penting dalam menentukan pusat pertumbuhan ekonomi karena dapat menunjukkan sektor unggulan yang menjadi penggerak utama pembangunan wilayah. Sleman berperan sebagai pusat pertumbuhan utama karena didukung sektor jasa modern dan fasilitas pelayanan yang lengkap. Bantul dan Kulon Progo berpotensi menjadi sub-pusat pertumbuhan karena memiliki sektor basis yang mampu mendukung perkembangan ekonomi wilayah sekitarnya. Sementara itu, Gunungkidul berperan sebagai wilayah pendukung atau *hinterland* dengan kekuatan utama pada sektor primer dan sumber daya alam. Untuk memastikan bahwa pengembangan sektor basis tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan wilayah dan penurunan Gini Ratio, diperlukan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan. Strategi yang dapat diterapkan mencakup penguatan hilirisasi sektor

unggulan, peningkatan keterhubungan antar sektor ekonomi, pemerataan investasi infrastruktur, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kawasan yang telah berkembang. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada wilayah maju, tetapi juga dapat dirasakan oleh wilayah lain secara lebih merata. Pengembangan sektor unggulan dan pemerataan pembangunan wilayah menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Melalui strategi tersebut, peningkatan PDRB diharapkan tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan pembangunan serta peningkatan taraf hidup masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkelanjutan.

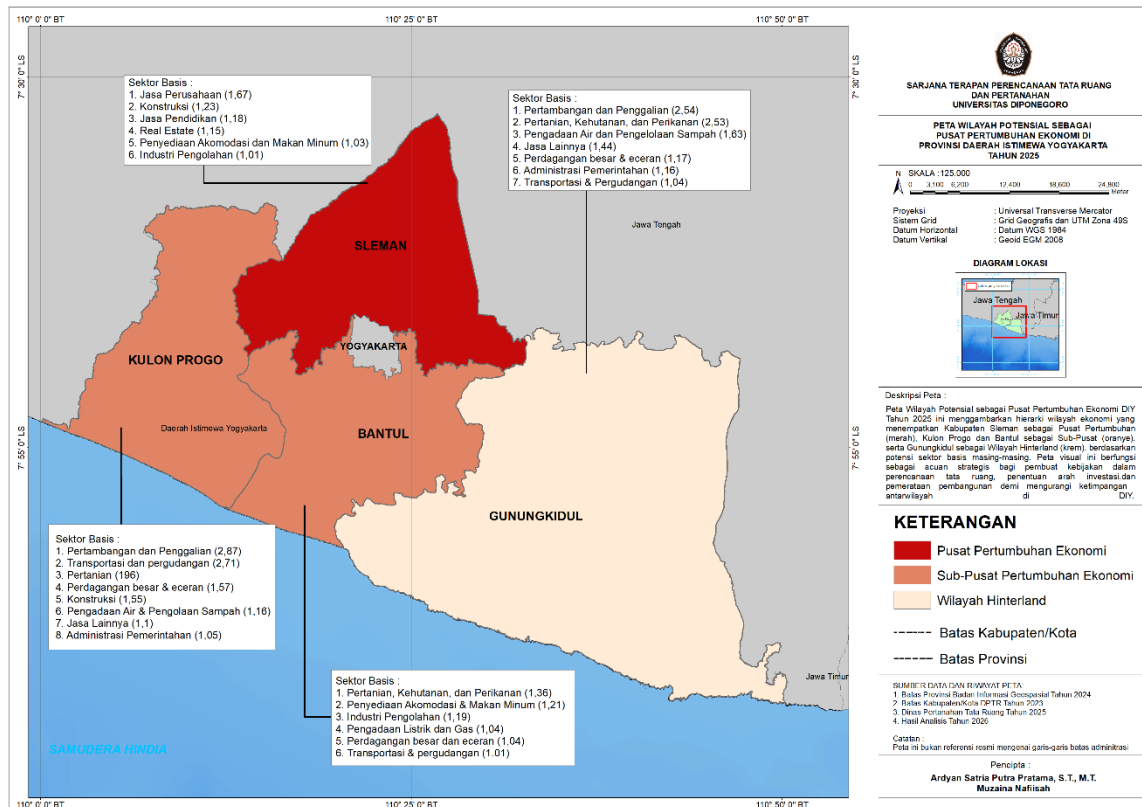
#### 4.4 Penentuan Wilayah Potensial Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Hasil rekapitulasi seluruh analisis yang telah dilakukan pada tabel 9 menunjukkan penentuan wilayah pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui penggabungan hasil analisis pusat pelayanan, interaksi spasial wilayah, dan wilayah potensial. Analisis tersebut meliputi metode skalogram, indeks sentralitas *Marshall*, gravitasi, tipologi *Klassen*, dan *Location Quotient (LQ)*. Setiap metode memberikan gambaran mengenai kapasitas pelayanan wilayah, tingkat sentralitas, kekuatan interaksi antarwilayah, kondisi pertumbuhan ekonomi, serta sektor unggulan yang dimiliki masing-masing kabupaten. Hasil interpretasi dari seluruh analisis tersebut kemudian direkapitulasi untuk menentukan kategori wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sub-pusat pertumbuhan ekonomi, dan wilayah *hinterland*.

**Tabel 9. Penentuan Wilayah Potensial Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

Kabupaten	Skalogram	ISM	Gravitasi	Tipologi <i>Klassen</i>	LQ	Dokumen	Pusat Pertumbuhan
Sleman	Hierarki I	Hierarki I	Pusat	Kuadran I	6 Sektor	PKW (RTRW)	Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Kulon Progo		Hierarki III	Hierarki II	Kuadran III	8 Sektor	PKWp (RPJMD)	Sub Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Bantul	Hierarki I		Kuadran IV	6 Sektor	PKW (RTRW)	Sub Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
Gunungkidul	Hierarki II			Hierarki III	7 Sektor	PKWp (RPJMD)	Wilayah <i>Hinterland</i>

Sumber : Hasil Analisis, 2026



Sumber : Hasil Analisis, 2026

Gambar 23. Peta Tematik Pusat Pertumbuhan Ekonomi DIY

Berdasarkan peta di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Provinsi DIY karena menunjukkan dominasi pada hampir seluruh indikator analisis. Berdasarkan analisis pusat pelayanan, Kabupaten Sleman memiliki kelengkapan fasilitas, tingkat hierarki pelayanan, dan nilai indeks sentralitas tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Sleman memiliki kapasitas pelayanan publik, fasilitas sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang paling lengkap sehingga mampu melayani wilayah di sekitarnya. Selain itu, hasil metode gravitasi menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki hubungan interaksi spasial yang kuat dengan wilayah lain, khususnya Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Dari sisi ekonomi, Kabupaten Sleman juga termasuk wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang tinggi, sehingga mampu berperan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pusat distribusi pelayanan di Provinsi DIY.

Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai sub-pusat pertumbuhan ekonomi karena memiliki potensi pengembangan wilayah yang cukup kuat dan didukung oleh interaksi spasial yang tinggi dengan Kabupaten Sleman sebagai pusat pertumbuhan utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki kelengkapan fasilitas dan tingkat sentralitas yang relatif tinggi, meskipun masih berada di bawah Kabupaten Sleman. Selain

itu, Kabupaten Bantul memiliki sektor-sektor unggulan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, seperti sektor pertanian, industri pengolahan, dan penyediaan akomodasi makan minum. Keberadaan sektor-sektor basis tersebut menunjukkan bahwa Bantul memiliki kemampuan ekonomi yang cukup kuat untuk mendukung penyebaran pertumbuhan ekonomi dari pusat utama ke wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, Kabupaten Bantul berperan sebagai wilayah penyangga sekaligus sub-pusat pertumbuhan yang mendukung pemerataan pembangunan di DIY.

Kabupaten Kulon Progo juga ditetapkan sebagai sub-pusat pertumbuhan ekonomi karena memiliki potensi strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah DIY bagian barat. Berdasarkan hasil analisis, Kabupaten Kulon Progo memiliki posisi yang cukup baik dalam hierarki pelayanan dan menunjukkan adanya perkembangan ekonomi yang didukung oleh sektor-sektor basis, seperti transportasi dan perdagangan, pertanian, serta pertambangan. Keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA) turut memperkuat posisi Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah strategis yang memiliki peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, hasil metode gravitasi menunjukkan bahwa Kulon Progo memiliki hubungan interaksi yang cukup kuat dengan wilayah pusat, sehingga berpotensi berkembang sebagai sub-pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu mendorong pemerataan pembangunan wilayah barat DIY.

Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul dikategorikan sebagai wilayah *hinterland* atau wilayah pendukung. Penetapan tersebut didasarkan pada hasil analisis yang menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat sentralitas, kelengkapan fasilitas, dan kekuatan interaksi spasial yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Meskipun demikian, Kabupaten Gunungkidul tetap memiliki sektor unggulan yang berpotensi mendukung pengembangan ekonomi wilayah, khususnya pada sektor pertanian dan pertambangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Gunungkidul masih berperan sebagai wilayah penyedia sumber daya dan wilayah pendukung bagi pusat pertumbuhan ekonomi di DIY. Namun, keterbatasan aksesibilitas, fasilitas pelayanan, dan konsentrasi aktivitas ekonomi menyebabkan wilayah ini belum berkembang optimal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama.

Konsep *growth pole* menjadi dasar dalam penentuan pusat pertumbuhan dan sub-pusat pertumbuhan ekonomi sebagai upaya mengurangi ketimpangan pembangunan

antarwilayah melalui mekanisme *spread effect* atau dampak sebar. *Spread effect* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah pusat dapat memberikan pengaruh positif kepada wilayah sekitarnya melalui penyebaran investasi, aktivitas ekonomi, infrastruktur, pelayanan, dan kesempatan kerja. Sub-pusat pertumbuhan berperan sebagai penghubung antara pusat pertumbuhan utama dan wilayah *hinterland* sehingga manfaat pembangunan dapat tersebar lebih luas. Penguatan sektor unggulan, kapasitas pelayanan wilayah, dan konektivitas antarwilayah menjadi faktor penting dalam mendukung proses penyebaran pertumbuhan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, Kabupaten Sleman ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan utama, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo sebagai sub-pusat pertumbuhan, serta Kabupaten Gunungkidul sebagai wilayah *hinterland*. Penentuan ini didasarkan pada hasil interpretasi gabungan analisis pelayanan wilayah, interaksi spasial, pertumbuhan ekonomi, dan sektor unggulan masing-masing kabupaten. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penetapan pusat pertumbuhan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan wilayah dalam menyediakan pelayanan, membangun keterkaitan antarwilayah, dan mengembangkan sektor basis. Dengan demikian, pusat pertumbuhan dan sub-pusat pertumbuhan diharapkan mampu menciptakan *spread effect* yang mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah di Provinsi DIY.

Hasil penentuan pusat pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan penataan ruang dan pembangunan wilayah yang tercantum dalam RTRW DIY Tahun 2023–2043 dan RPJMD DIY Tahun 2022–2027. Berdasarkan RTRW DIY, sistem pusat kegiatan wilayah menetapkan Kota Yogyakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), sedangkan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama, sementara Kabupaten Bantul berperan sebagai sub-pusat pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara hasil analisis penelitian dengan kebijakan struktur ruang dalam RTRW DIY, di mana wilayah yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan juga memiliki tingkat sentralitas, kelengkapan fasilitas, interaksi spasial, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat arah pengembangan wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW DIY sebagai upaya mendukung pemerataan pembangunan wilayah melalui penguatan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Selain itu, hasil penelitian juga relevan dengan arah pengembangan kawasan strategis dalam RPJMD DIY Tahun 2022–2027 yang menetapkan Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon Prambanan, Kawasan Tempel Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY sebagai kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi. Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebagai sub-pusat pertumbuhan ekonomi karena memiliki potensi strategis yang didukung oleh sektor transportasi dan pergudangan, pertanian, serta keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA). Hasil tersebut sejalan dengan pengembangan Kawasan Temon–Prambanan dalam RPJMD yang diarahkan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi baru di DIY. Pengembangan bandar udara baru, konsep *Airport City* dan *Aerotropolis* menjadi faktor yang memperkuat posisi Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah potensial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Sesuai dengan RTRW DIY, terdapat perubahan sistem perkotaan yang turut memengaruhi arah pengembangan wilayah di masa mendatang, khususnya pada Kawasan Perkotaan Temon - Wates (Kulon Progo) dan Kawasan Perkotaan Wonosari (Gunungkidul) yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp). Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar kawasan inti Kota Yogyakarta. Hasil penetapan Kabupaten Kulon Progo sebagai sub-pusat pertumbuhan ekonomi dan Kabupaten Gunungkidul sebagai wilayah *hinterland* menunjukkan bahwa wilayah barat dan selatan DIY memiliki peluang untuk terus berkembang melalui penguatan konektivitas, infrastruktur, dan sektor unggulan daerah. Dengan demikian, kombinasi antara hasil analisis penelitian dengan kebijakan RTRW dan RPJMD menunjukkan bahwa pengembangan pusat dan sub-pusat pertumbuhan ekonomi di DIY diarahkan untuk menciptakan *spread effect* yang mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah melalui penyebaran aktivitas ekonomi, investasi, dan pelayanan ke wilayah penyangga dan *hinterland*.

RTRW DIY 2023–2043 Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana Kabupaten Sleman, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul lebih tepat dikategorikan sebagai sub-pusat pertumbuhan ekonomi. Perbedaan tersebut disebabkan karena penentuan pusat pertumbuhan dalam penelitian ini tidak hanya mengacu pada kebijakan tata ruang, tetapi juga berdasarkan hasil analisis empiris yang mempertimbangkan aspek fasilitas pelayanan, interaksi spasial, dan kondisi ekonomi wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki tingkat

sentralitas, kelengkapan fasilitas, dan kinerja ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sehingga ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan utama. Sementara itu, Kabupaten Bantul meskipun memiliki peran penting dalam struktur ruang sebagai PKW, masih menunjukkan tingkat interaksi dan kapasitas ekonomi yang berada di bawah Kabupaten Sleman sehingga lebih sesuai berperan sebagai sub-pusat pertumbuhan.

Hal yang sama berlaku pada Kabupaten Gunungkidul. Meskipun dalam dokumen RTRW DIY 2023–2043 dan RPJMD DIY 2022–2027 Gunungkidul diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), hasil penelitian menempatkan wilayah tersebut sebagai *hinterland*. Penetapan ini didasarkan pada hasil analisis gabungan yang menunjukkan bahwa Gunungkidul memiliki tingkat interaksi spasial yang lebih rendah, kelengkapan fasilitas yang relatif lebih terbatas, serta kondisi ekonomi yang belum sekuat wilayah lain. Hasil Tipologi Klassen juga menunjukkan bahwa Gunungkidul termasuk dalam kategori wilayah relatif tertinggal (kuadran IV), sehingga belum memenuhi karakteristik sebagai pusat pertumbuhan maupun sub-pusat pertumbuhan. Dengan demikian, perbedaan antara hasil penelitian dan arahan kebijakan RTRW maupun RPJMD menunjukkan bahwa penelitian ini menggambarkan kondisi aktual wilayah berdasarkan data dan hasil analisis, sedangkan RTRW dan RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah pengembangan wilayah yang diharapkan dapat dicapai pada masa mendatang.